

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KESESUAIAN
AKAD PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar
Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

FATIMAH PUTRI ISLAMIATI
NPM.1621030569

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KESESUAIAN
AKAD PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar
Pringsewu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**FATIMAH PUTRI ISLAMIATI
NPM.1621030569**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Pringsewu merupakan salah satu badan yang menyediakan sebuah pembiayaan, salah satu diantaranya adalah pembiayaan *mudharabah*. Sebagaimana dari masyarakat lebih memilih *mudharabah* dikarenakan minimnya modal yang dimiliki oleh masyarakat. Besar kecilnya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah menjadi titik permasalahan dalam proses pembiayaan *mudharabah* tersebut yang akhirnya KSPPS BMT Fajar Pringsewu mengeluarkan kebijakan dengan memastikan perolehan keuntungan nisbah bagi hasil antara KSPPS dan nasabah diawal waktu pembiayaan, dan juga menggunakan jaminan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* mengalami kerugian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Pringsewu? Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada kesesuaian akad produk pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Pringsewu, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada kesesuaian akad produk pembiayaan *mudharabah* tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif *analisis*, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada para pengelola KSPPS BMT Fajar Pringsewu dan beberapa nasabah, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola KSPPS BMT Fajar Pringsewu dan beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu. Analisis data yaitu dengan analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode cara berfikir *induktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Pringsewu terdiri dari 3 tahap yaitu: permohonan pembiayaan dengan prosedur yaitu mengisi formulir, melengkapi persyaratan berupa jaminan, survey analisis 5C terhadap nasabah, ijab kabul dan melakukan pengawasan terkait usaha yang dijalankan. Pada tahap pembiayaan, KSPPS melakukan nisbah bagi hasil sebesar 75% bagi KSPPS dan 25% nasabah untuk pembiayaan di atas Rp. 15.000.000,- menggunakan modal pokok. Tinjauan fiqh muamalah pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Pringsewu bahwa penerapan nisbah bagi hasil sebesar 75% KSPPS : 25% nasabah, pada pembiayaan *mudharabah* yang diambil dari jumlah modal pembiayaan serta pertanggung jawaban resiko kerugian yang tidak sama antara pembiayaan *mudharabah* yang satu dengan lainnya, menurut hukum ekonomi syariah belum sesuai dengan syariat Islam, karena nisbah bagi hasil yang diperoleh bertentangan dengan teori fiqh muamalah dimana keuntungan dan kerugian harus merupakan bagian dari nisbah dan dilakukan dengan cara bagi hasil berdasar kesepakatan kedua belah pihak, bukan dengan menentukan jumlah nominal pokok diawal agar tidak merugikan salah satu pihaknya. Namun penerapan adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* ini diperbolehkan sebagai kedaruratan atau keadaan yang memaksa terhadap moral *hazard* oleh nasabah terhadap KSPPS BMT Fajar Pringsewu.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Putri Islamiati
Npm : 1621030569
Jurusan/Prodi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16-11-2020



Fatimah Putri Islamiati
NPM.1621030569



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
KESESUAIAN AKAD PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)**

**Nama : Fatimah Putri Islamiati
Npm : 1621030569
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Khoirudin, M.S.I

NIP. 197807252009121002

Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy

NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoirudin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG KESESUAIAN AKAD PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH** (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu) Disusun oleh :
Fatimah Putri Islamiati, NPM: 1621030569, program studi: **Mu'amalah**, telah
diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung.

Tim Dewan Penguji

Ketua penguji : Juhratul Khulwah, M.S.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ،
وَالْمُقَارَضَةُ ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)¹

Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).



¹ Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 2, (Darul Fikri, 207-275 M), h. 768.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Fatimah Putri Islamiati, lahir di Pringsewu pada tanggal 24 Januari 1998 Anak keenam dari enam bersaudara. Merupakan buah cinta dari pasangan bapak Nazarudin dan ibu Ernani.

Pendidikan dimulai dari, SDN 1 Waluyojati 2004-2010, SMP N 3 Pringsewu 2010-2013, SMA N 2 Pringsewu 2013-2016, Melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program (S1).

Pringsewu, 16-11-2020
Penulis,

Fatimah Putri Islamiati



PERSEMBAHAN


Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tersayang:

1. Ayahanda tercinta Nazarudin Ibunda tercinta Ernani sebagai tanda bakti hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia. Tak lupa juga dengan pengorbanan yang tak ternilai dan tak terbalas.
2. Kakak-kakakku tercinta Muhammad Bachtiar, Muhammad Hardian Arianto, Muhammad Defitra Fahlepi, Muhammad Arya Riski Haryanda, Muhammad Nawawi Pandawa Putra, yang telah memberiku doa, dukungan, saran dan nasehatnya, serta selalu memberikan semangat kepadaku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Fatimah Putri Islamiati, lahir di Pringsewu pada tanggal 24 Januari 1998 Anak keenam dari enam bersaudara. Merupakan buah cinta dari pasangan bapak Nazarudin dan ibu Ernani.

Pendidikan dimulai dari, SDN 1 Waluyojati 2004-2010, SMP N 3 Pringsewu 2010-2013, SMA N 2 Pringsewu 2013-2016, Melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program (S1).



Pringsewu, 16-11-2020
Penulis,

Fatimah Putri Islamiati

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah***(Studi Pada KSPPS BMT Fajar **Pringsewu**) dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan , bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Perpustakaan Pusat Uin Raden Intan Lampung.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Nabila Nur Azizah ,Lia Pramurisari, Qurnia Nurul Fitri, Regita Dwi Cahyani, Reri Ilahi, Rani Karenina, Siti Naimah, Anggi Makhruf, Muhammad Ibnu Azhari, Ahmad Amrullah, Dicky Kurniawan, Robby Satrio, Ayu Syahira Ganda, Herlina, Reviyana Puspitasari, Mutiara Alfisa, Annisa Amalia , Putri Narulita, Herawati, Fira Junianta Sari, Fiar Aprilia, Yuvita Tri Rejeki, Yenny Nur Soleha Yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
8. Teman-teman Muamalah A yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.
9. Teman-teman KKN kelompok 77 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu memberikan semangat serta tawa canda selama ini.
10. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan

terbuka dan ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar lampung, 16-11- 2020
Penulis

Fatimah Putri Islamiati
NPM.1621030569



KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu)** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan , bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Perpustakaan Pusat Uin Raden Intan Lampung.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Nabila Nur Azizah ,Lia Pramurisari, Qurnia Nurul Fitri, Regita Dwi Cahyani, Reri Ilahi, Rani Karenina, Siti Naimah, Anggi Makhruf, Muhammad Ibnu Azhari, Ahmad Amrullah, Dicky Kurniawan, Robby Satrio, Ayu Syahira Ganda, Herlina, Reviyana Puspitasari, Mutiara Alfisa, Annisa Amalia , Putri Narulita, Herawati, Fira Junianta Sari, Fiar Aprilia, Yuvita Tri Rejeki, Yenny Nur Soleha Yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
8. Teman-teman Muamalah A yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.
9. Teman-teman KKN kelompok 77 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu memberikan semangat serta tawa canda selama ini.
10. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

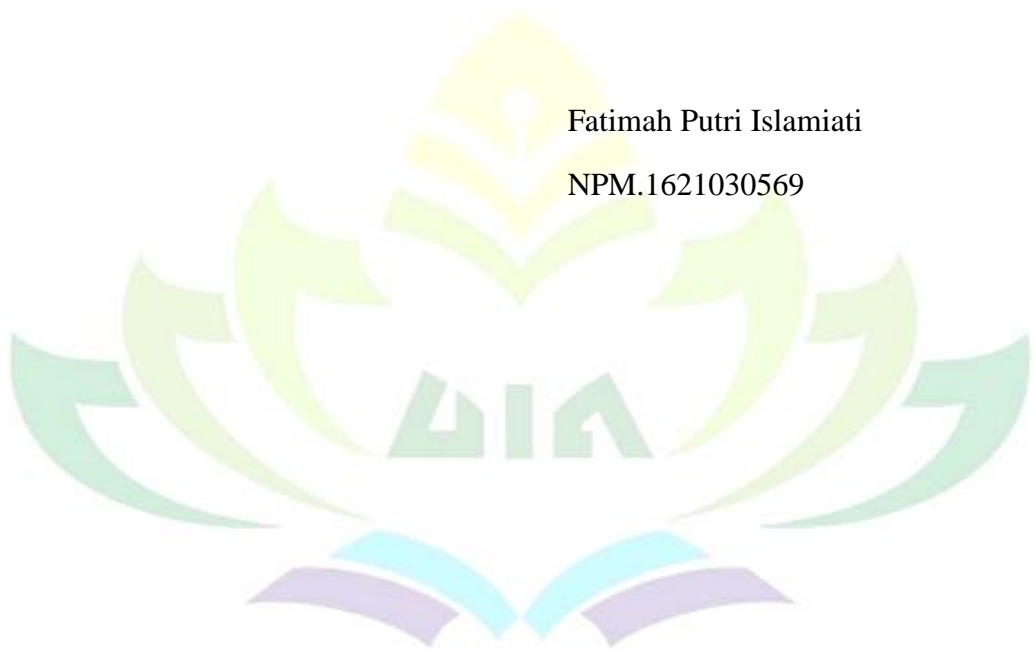
Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan

terbuka dan ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar lampung, 16-11- 2020
Penulis

Fatimah Putri Islamiati

NPM.1621030569



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	11
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Signifikansi Penelitian	13
H. Metode Penelitian.....	13

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	22
1. Akad Dalam Islam.....	22
a. Pengertian Akad	22
b. Dasar Hukum Akad	23
c. Rukun Dan Syarat Akad	24
d. Macam-Macam Akad	27
e. Asas Berakad Dalam Islam	30
f. Berakhirnya Akad	36
2. <i>Mudharabah</i>	37
a. Pengertian <i>Mudharabah</i>	37
b. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	41
c. Rukun Dan Syarat <i>Mudharabah</i>	44
d. Jaminan Dalam <i>Mudharabah</i>	48
e. Ketentuan Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	52
f. Nisbah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	57
g. Manfaat Dan Resiko <i>Mudharabah</i>	59
h. Fatwa MUI tentang <i>Mudharabah</i>	63

B. Tinjauan Pustaka	60
BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Fajar Pringsewu	63
B. Praktik Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di KSPPS BMT Fajar Pringsewu	77
BAB IV : ANALISA DATA	
A. Analisis Praktik Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di KSPPS BMT Fajar Pringsewu	90
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Kesesuaian Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di KSPPS BMT Fajar Pringsewu.....	96
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Rekomendasi.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan ke keliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Kesesuaian Akad pada Produk Pembiayaan *Mudharabah*” (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu)** Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²

3. Kesesuaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti yaitu keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya), kecocokan.³
4. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.⁴
5. Produk adalah dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi ini. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk adalah penawaran atau pemecahan.⁵
6. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata

² Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h. 73.

³Kesesuaian (*on-line*) tersedia di <https://lektur.id/arti-kesesuaian/> (31 Januari 2020) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 170

⁵Dendi Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1215.

lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.⁶

7. *Mudharabah* adalah penyerahan harta dari pemilik modal/harta kepada pihak pengelola untuk digolongkan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.⁷

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu)**” yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Melihat masyarakat yang membutuhkan pembiayaan *mudharabah* guna untuk mengembangkan usaha, namun munculnya masalah pada produk pembiayaan *mudharabah* yang apabila tidak adanya jaminan maka modal atau dana dari pembiayaan *mudharabah* tidak dapat diberikan. Hal ini menjadi daya tarik untuk melihat apakah lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya KSPPS BMT Fajar Pringsewu

⁶Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681.

⁷Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 67.

apakah telah menerapkan prinsip syariah dalam pembiayaan *mudharabah* sebagaimana mestinya. Sehingga penelitian ini dianggap perlu dengan menganalisis dari sudut pandang fiqh muamalah atau hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta banyaknya teori dan literatur yang mempermudah dalam proses penyelesaiannya.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.⁸ Islam menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupannya berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menegakkan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individual dan masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan serta ketentraman, menuju kepada kehidupan yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah SWT.⁹

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) h. 5.

⁹ Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004) h. 116.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah, yaitu hukum, hukum dan ahkam, syari'ah atau syari'at, fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.¹⁰

Perkembangan usaha dengan sistem syari'ah sendiri dibuktikan dengan perkembangan lembaga bisnis syari'ah diantaranya pendirian *Baitul maal Wat Tamwil* (BMT) yang bergerak disektor pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah.¹¹ Dengan adanya kebutuhan manusia pada perkembangan zaman ini, *Baitul maal Wat Tamwil* (BMT) telah banyak berkembang dan mempunyai produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat modern sekarang ini yang sesuai dengan syari'ah.

Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpun dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, *infaq* dan *shodaqah*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai penghimpun dana dan penyalur dana komersial.¹²

Penghimpunan dana yang terkait langsung dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip atau akad *mudharabah* (*mudharabah mutlaqah*/investasi tidak

¹⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42.

¹¹Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 2-3.

¹²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013) h. 107.

terikat) karena bank syari'ah menjalankan prinsip bagi hasil dengan pemilik dana mudharabah ini.¹³

Dengan adanya akad-akad yang sesuai syari'ah tersebut, manusia dalam menjalankan usahanya akan bebas dan terhindar dari riba, *maisyr*, *gharar*, dan maksiat. Sehingga manusia akan lebih jujur dan akan lebih barokah dalam menjalankan usahanya tersebut. Firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 1)

Dengan diturunkannya firman tersebut, sehingga jelaslah bahwa akad-akad yang berdasarkan syari'ah sangat dianjurkan dan diharuskan dalam melakukan kegiatan usaha dan berhati-hati dalam menjalankan usahanya sesuai dengan syari'at Islam, yaitu dengan jujur, adil, tidak adanya riba, *maisyr*, *gharar* di dalam usaha tersebut maka usahanya akan berkah dan halal.

¹³Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005) h. 32-33.

Menjadi hal yang sangat lumrah jika seseorang ingin agar hartanya dapat memiliki nilai tambah. Sehingga selalu berusaha untuk mengembangkan harta yang dimilikinya, bisa dengan memutarnya dalam dunia perdagangan, atau pun dengan menanamkan investasi dalam bidang tertentu. Sementara itu, terkadang sebagai pemilik, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya atau dengan melakukan kerjasama. Disisi lain juga berbanding terbalik, seseorang yang mempunyai keahlian tidak punya modal untuk mengembangkan keahliannya.

Berdasarkan penjelasan diatas kemudian dibuat kesepakatan dalam pengembangan usaha tersebut, sehingga bisa saling menguntungkan. Salah satu jenis bentuk kerjasama dalam Islam, yaitu apa yang dikenal dengan istilah *mudharabah* (dalam istilah lain juga disebut *qiradh*). Inilah solusi yang bisa dilakukan, orang yang memiliki harta yang cukup tetapi memiliki skill untuk mengolah harta melalui usaha yang ia lakukan. Inilah salah satu bentuk hubungan sosial yang diharapkan oleh Islam, yakni kaum lemah membantu kaum lemah.¹⁴

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*), pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan

¹⁴Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Jarakah Tugu: Karya Abadi Jaya, 2015) h. 102-103.

usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.¹⁵

Dalam oprasionalnya *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha, sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.¹⁶

Secara tekhnis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* menyerahkan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal. *Mudharabah* disebut juga *muqradhah* (*qiradh*). *Qiradh* berasal dari kata *al-qardhu*, artinya pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan yang mendapatkan keuntungan.¹⁷

¹⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*).

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer, cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 151.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 95

Dalam fatwa MUI pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang bersifat amanah (*yad al-amanah*). Perjanjian ini merupakan perjanjian yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tingkat keadilan antara kedua belah pihak. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga jaminan bersama. Artinya, tidak diperkenankan *shahibul mal* memintakan jaminan kepada *mudharib* karena *mudharib* hanyalah sebagai pengelola modal. Dalam literatur fiqh pun tidak dicantumkan bahwa jaminan sebagai salah satu syarat dari perjanjian tersebut.¹⁸

Kemudian dalam hal sistem yang digunakan pada bank syariah yang telah disahkan oleh MUI adalah *revenue sharing* (bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan kotor) dan *profit loss sharing* (bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha setelah di kurangi biaya operasional atau pendapatan bersih)

Pembiayaan berisikan penyediaan dana dan tagihan yang memiliki tujuan tidak hanya sekedar meningkatkan profit saja, namun juga harus mampu menghadirkan sisi kemanfaatan untuk masyarakat. Pembiayaan pada bank syariah yang lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian seperti pembiayaan *mudharabah*, karena pada kedua pembiayaan tersebut memberikan sebuah tawaran kerjasama yang mampu membantu perekonomian masyarakat dengan pembagian hasil yang sama dan tidak merugikan salah satu pihak.

¹⁸DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Intemasa, 2003), h. 48.

Pembiayaan *mudharabah* mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dengan memberikan modal usaha kepada anggota. Namun dalam realitanya pembiayaan *mudharabah* kurang mendapat perhatian dari masyarakat dengan alasan pembiayaan ini terlalu rumit untuk dijalankan dengan pemberlakuan adanya sebuah jaminan, pembagian hasil yang dilakukan diawal akad, dan butuh kepercayaan penuh dari *shohibul maal* kepada *mudharib* agar meminimalisir adanya sebuah resiko dalam pemberian pembiayaan *mudharabah*. Seperti yang terjadi pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu.

Pendiriannya KSPPS BMT Fajar Pringsewu sebenarnya tidak lepas dari keinginan untuk menolong para pengusaha kecil yang berkaitan dengan ketersediaan modal usaha dimana besarnya keuntungan dari bagi hasil yaitu sebagai penentu besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu dimuka atau diawal akad dengan berpedoman pada kemungkinan perkiraan untung dan rugi terhadap usaha yang dijalankan.

Sistem bagi hasil merupakan salah satu sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil pada sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, serta pada aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal

terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu dimana dalam proses akad pembiayaan *mudharabah* pada nisbah bagi hasilnya bergantung kepada jumlah besar kecilnya pembiayaan *mudharabah* yang diajukan. Apabila jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diajukan berada dalam taraf kecil maka nisbah bagi hasilnya dilakukan pada akhir, dengan menghitung jumlah keuntungan. Namun apabila jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diajukan dalam taraf besar maka nisbah bagi hasil dilakukan pada awal yaitu dengan mengambil dari jumlah modal yang diberikan kepada nasabah.

Padahal secara teori mengenai nisbah bagi hasil harus ditentukan presentase untuk *mudharib* dan *shahibul maal*. Dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*) telah dijelaskan mengenai keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal kemudian bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.¹⁹

¹⁹Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

Dalam proses pencairan modal *mudharabah* tersebut juga harus disertakan dengan sebuah jaminan yang disesuaikan dengan jumlah besaran modal yang diberikan. Semakin besar jumlah modal yang diminta maka semakin besar pula jaminan yang harus diberikan. Apabila jaminan tidak diberikan pada saat akad maka pihak KSPPS BMT Fajar sendiri tidak akan memberikan modal tersebut.

Dalam Undang-Undang Perbankan No 10 Pasal 1 Mengenai Ketentuan Umum Penjelasan No 23 yaitu Agunan adalah jaminan tambahan yang disertakan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menjelaskan bahwa jaminan harus pula disertakan dalam bentuk agunan.

Padahal menurut pengertian *mudharabah* di atas, dapat tergambarkan bahwa *mudharib* adalah pihak yang tidak mempunyai uang sehingga pihak *mudharib* memohon kepada *shahibul maal* untuk memberikan modal dengan penekanan adanya pengembalian modal dan keuntungan jika terdapat keuntungan.

Dengan demikian, penulis berargumen bahwa kesesuaian akad pada produk pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu layak untuk dibahas, dengan melihat ketentuan dalam pemberian modal pada pembiayaan *mudharabah* terutama terhadap praktik dan teori fiqh muamalah mengingat masyarakat masih sangat membutuhkan dana untuk

mengembangkan perekonomian namun terbentur pada masalah modal atau dana.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka kesesuaian akad pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Pringsewu sama seperti pembiayaan *mudharabah* pada umumnya akan tetapi dalam praktiknya pihak KSPPS BMT Fajar Pringsewu melakukan nisbah bagi hasil pada awal akad menggunakan modal pembiayaan bukan berdasarkan keuntungan, dengan pemberian jaminan sebagai penanggungan resiko kerugian tidaklah dalam proses pembiayaan *mudharabah* tersebut. Maka fokus penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah pada praktik pembiayaan *mudharabah* (studi pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah pihak KSPPS BMT Fajar Pringsewu.
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah praktik kesesuaian akad pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Pringsewu.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang kesesuaian akad produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Pringsewu ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Pringsewu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang kesesuaian akad produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Pringsewu.

G. Signifikasi Penelitian

1. Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah kesesuaian akad pada produk pembiayaan *mudharabah*, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁰ Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²¹ Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan banyak pihak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²²

Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji suatu praktik kesesuaian akad dalam pembiayaan mudharabah yang sudah berjalan cukup lama di dalam masyarakat yang disesuaikan pada teori yang sebenarnya menurut hukum fiqh muamalah untuk melahirkan sebuah prespektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada praktik kesesuaian akad dalam pembiayaan *mudharabah*.

²⁰Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 41.

²¹Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

²²Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (*Field Research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.²³ Dari penelitian lapangan ini penulis menggali data yang berkenaan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁴ Ini berkaitan dengan penelitian mengenai kesesuaian akad pada produk pembiayaan *mudharabah*.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²⁵

Maka dari itu penelitian ini menggunakan sumber data:

²³Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), h. 3.

²⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), h. 44

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi XV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 114.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung.²⁶ Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari KSPPS BMT Fajar Pringsewu yang berasal dari wawancara yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian

b. Data sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset, yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah, dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.²⁷ Data yang sekunder didapatkan pada buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan pada penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.²⁸ Populasi dalam penelitian ini ada 10 orang terdiri dari 1 pimpinan cabang, 1 *marketing* pembiayaan, 2 *marketing*

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 14.

²⁷*Ibid.*, h 58.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-13, h. 26.

funding, 1 CS dan 5 nasabah pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁹ Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua. Jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Oleh karena itu berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan dan dalam penelitian ini sampel berjumlah 10 orang yaitu 1 pimpinan cabang, 1 *marketing* pembiayaan, 2 *marketing funding*, 1 CS dan 5 nasabah pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu. Jadi keseluruhan populasi diambil semua. Maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

I. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 173.

yang diselidik.”³⁰ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktik kesesuaian akad pada produk pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu.

b. *Interview*

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³¹ *Interview* atau wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para informan yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode *interview* yang di gunakan yaitu metode *interview* bebas terpimpin, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang berkaitan dengan praktik kesesuaian akad pada produk pembiayaan *mudharabah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan merekam, memfotocopy atau foto menggunakan camera tangan untuk dokumen yang bersifat resmi.

³⁰Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

³¹Abdul Kodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.³²
- b. Sistematis data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.³³

6. Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.³⁴ Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode *kualitatif* yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu kesesuaian akad pada produk pembiayaan mudharabah ditinjau dari fiqh muamalah yang akan diolah dengan metode *deskriptif analitis*. Metode *deskriptif analitis* yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari

³²Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan, 2015), h. 122.

³³*Ibid.*

³⁴Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), h. 205.

permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.³⁵

Maksudnya bahwa analisa ini bertujuan untuk mengetahui praktik kesesuaian akad pada produk pembiayaan mudharabah dilihat dari Hukum Islam atau fiqh muamalah, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

Dalam menganalisa penulis menggunakan pendekatan berfikir *deduktif* dan *induktif*. Berfikir *deduktif* yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode *deduktif* diawali dengan sebuah teori dan kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. Sedangkan berfikir *induktif* adalah metode yang digunakan dengan bertolak dari khusus ke umum.³⁶

³⁵Rama Dona Laila, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang". (Skripsi Program Strata I Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 2018), h. 10.

³⁶Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., h. 205.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad Dalam Islam

a. Pengertian Akad (الْعَقْدُ)

Menurut bahasa “akad” (العقد) jamaknya *al-‘uqud* (العُقُود) mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan (الشَّدُّ), mengikat (الرِّبْط). Kebalikannya adalah berarti melepaskan (الْحَلُّ). Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengkokohkan (التَّوَثُّيقُ), menguatkan (الْيُؤَكِّدُ), menjamin (الضَّمَانُ), dan berjanji (الْعَهْدُ).¹

Istilah akad dalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang terdapat beberapa definisi dari akad itu sendiri:

- 1) Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, *akad* merupakan pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum padan objek akad.
- 2) Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²

¹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1-2.

²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamal Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

Adapun makna akad secara syar'i yaitu "Hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.³

Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.⁴

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad itu sendiri adalah suatu ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian atau suatu kegiatan yang mana akad tersebut akan mengikat kedua belah pihak sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad.

b. Dasar Hukum Akad

Firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.

⁴ *Ibid.*,

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Q.S Al-Maidah (5): 1).

Firman Allah SWT berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”(Q.S Al-Isra’(17): 34)

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- a) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*),
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*),
- c) Objek akad (*mahallul-‘aqd*),
- d) Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).

2) Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad atau perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:⁵

- a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al- in 'iqad*) antara lain:
 - (1) *Tamyiz*,
 - (2) Berbilang pihak (*at-ta 'adud*),
 - (3) Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan)
 - (4) Kesatuan majelis akad,
 - (5) Objek akad dapat diserahkan,
 - (6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
 - (7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwin* dan *mamluk*),
 - (8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.⁶
- b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad memerlukan unsur-unsur penyempurn yang menjadikan suatu akad sah, unsur sahnya suatu akad itu disebut syarat penyempurnaan suatu akad. Syarat-syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- (1) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad.

⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*...., h. 97-104.

⁶Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*...., h. 95-98.

(2) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

c) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk dapat dilakukannya akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

(1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhinya dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sering digadaikan atau disewakan.

(2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

d) Syarat Mengikatnya Akad (*Syarthul-Luzum*)

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat hukumnya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

d. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu:

- 1) Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a) *Akad Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
 - (1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - (2) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz*.⁷
 - b) *Akad yang tidak sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sahih ini menjadi dua macam yaitu:

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106-108.

- (1) Akad yang *batil*, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.
- (2) Akad *fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.⁸

2) Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi:

a) Akad *Musamanah*

Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.

b) Akad *Ghairu Musamanah*

Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat seperti, *Aqad istishna' bai 'al-wafa'*.⁹

3) Berdasarkan Motifnya

Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi:

a) Akad *Tijarah*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan

⁸*Ibid.*

⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Dyariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 59.

mecari keuntungan, karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebagainya.

b) Akad *Tabarru'* (*gratutions contract*)

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirbala). Akad *tabarru'* dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Seperti *qard*, *wad'ah*, *rahn*, *kafalah*, dan lain sebagainya.¹⁰

4) Berdasarkan Sifat Benda

Berdasarkan sifat bendanya akad terbagi menjadi:

a) Akad *'ainiyah*

Yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah*, *ariyah*, *rahn* dan lain sebagainya.

b) Akad *Ghairu 'ainiyah*

Yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tepatnya *sighat* akad. Menimbulkan akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad *ainiyah*, seperti akad amanah.¹¹

¹⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 60-61.

¹¹*Ibid.*, h. 62.

5) Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad

Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi:

a) Akad *al-zamani* (akad bertempo)

Akad *al-zamani* yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini yaitu seperti akad upah-mengupah, sewa-menyewa, akad penitipan dan akad pinjam-meminjam. Akad tersebut memerlukan sebuah perjanjian atas lamanya suatu pinjaman atau titipan atau sewa.

b) Akad *al-fairui* (akad tidak bertempo)

Akad *al-fairui* yaitu akad dimana unsur tidak merupakan waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jual beli yang dapat terjadi seketika tanpa adanya unsur tempo dalam akad tersebut.¹²

e. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.¹³ Dimana asas berakad dalam Islam antara lain:

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., h. 91-92.

¹³*Ibid.*,

1) Asas Ilahiah

Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. *Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.¹⁴

2) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini yakni Q.S Al-Baqarah (2): 265; Al-Maidah (5): 1; Al- Hijr (15): 2; Ar-Run (30): 95; An-Nisa' (4): 33 dan 72.¹⁵

Firman Allah SWT yang berbunyi:

¹⁴Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005), h. 238.

¹⁵*Ibid.*,

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 265)

3) Asas Persamaan atau Kesenjangan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Seperti Firman Allah SWT berikut ini:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki” (Q.S An-Nahl (16): 71)

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

4) Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”(Q.S Al-Hadid (57): 25)

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur’an, bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah (5): 8)

Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat.

Oleh karena itu. Isalam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan

sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan juga dengan kezaliman.

Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya.¹⁶

5) Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa' (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*). Berikut isi dari Firman Allah tentang asas kerelaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’(4): 29)

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, (Rabbani Press, 1997), h. 396.

Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan haendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukaarela ini menunjukkan keikhlasan dan ikhtikad para pihak.

6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiqi*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidkajujuran ini tidak diterapkan dalam peikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” (Q.S Al-Ahzab (33): 70)

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan ddan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

7) Asas Tertulis (*Al- Kitabah*)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.¹⁷

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:¹⁸ sukarela (*ikhtiyari*), amanah, kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, *taisir/kemudahan*, ikhtikad baik, sebab yang halal.

f. Berakhirnya Akad

Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat (*dharuriyah*).

1) Sebab *ikhtiyariyah*

Sebab *ikhtiyariyah* tersebut adalah *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*).

¹⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*...., h. 98.

¹⁸*Ibid.*, h. 98-99.

2) Sebab *Daruriyah*

Sebab *daruriyah* tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Rusaknya objek akad (*ma'qud 'alaih*), seperti dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad *'ariyah* dan rusak benda yang dititipkan dalam akad *wadi'ah* atau hilangnya modal dalam akad *syirkah*.
- b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.
- c) Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad oleh orang lain.¹⁹

2. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁰ Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha. Salah satu diantara mereka merupakan

¹⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah....*, h. 26-28.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

pemodal dan yang lain merupakan pihak yang akan memutar, atau mengatur modal dengan usaha dan waktu yang dimilikinya.²¹

Prinsip akad *mudharabah* berdasar pada sistem bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka akan dibagi menurut besaran yang telah disepakati kedua belah pihak (margin yang telah disepakati). Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengusaha menanggung kerugian tersebut dengan usaha yang telah dilakukan.²²

Menurut fiqih *Mudharabah* atau disebut juga *muqaradhadh* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada para pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.²³ Secara terminologis, pengertian *mudharabah* dijelaskan oleh beberapa ulama berikut, yaitu Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudharabah*. Ulama Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mudharabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-

²¹ Ruslan Abdul Ghofur, Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. XII, No 3, Juni 2015.

²² *Ibid.*

²³ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 240.

sama dalam membagi keuntungan dengan modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.²⁴

Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut syara ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.²⁵

Menurut Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Dalam konteks perbankan syariah, definisi secara terminologi *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal (100%) dan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian modal, sedangkan apabila

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, (Bandung: Dar Al-Qalam, tth, 2010), h. 35.

²⁵ *Ibid.*, h. 37.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "*Fiqh al-Sunnah*", Juz 3, (Bandung: Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, t.th, 2010), h. 297.

kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁷

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*. Pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.²⁸

Keuntungan dibagikan sesuai *ratio* laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung. *Mudharabah* ada dua jenis, yaitu:

- 1) *Mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

²⁷Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. XII, No 3, Juni 2015.

²⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/200 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

- 2) *Mudharabah muqayyadah* yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya.²⁹

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* dapat ditinjau dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah* sebagai berikut:

1) Al-Quran

Dalam QS. Al-Jumu'ah (62): 10, yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dalam kitab Al-Misbah karya Muhammad Quraissy Shihab menafsirkan bahwa: Lalu, apabila telah ditunaikan shalat, maka jika kamu mau, maka bertebaranlah di muka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah SWT, karena karunia Allah SWT sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu melengahkan kamu.

²⁹Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* Edisi Ke 4, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 103.

Berdzikirlah dari saat ke saat dan di setiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu dambakan.³⁰ Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah perintah shalat Jum'at dilaksanakan maka Allah SWT telah memberikan anjuran kepada umat muslim agar melanjutkan kembali aktifitas duniawinya yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya (seperti bermuamalah), yang mana sebelumnya telah ditinggalkan sementara waktu karena harus segera menghadap Mihrab.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan andasan hukum akad *mudharabah*.

2) Al-Hadis

Adapun juga landasan dari As-Sunnah yang menjelaskan atau menyinggung masalah *mudharabah* yaitu Hadis Riwayat Ibnu Majah yaitu:

³⁰ *Ibid.*, h. 230.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَهْ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)³¹

“Nabi bersabda,”Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) *Ijma'*

Hukum *musharabah* menurut *ijma'* adalah *jaiz* (boleh).

Rosullulloh pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal dari padanya (Khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada zaman Jahiliyah, *mudharabah* telah ada dan diakui setelah datang agama Islam dibenarkan.³²

4) *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) diantara manusia ada yang miskin ada pula yang kaya, dsuatu sisi lain banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin

³¹ Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M, h. 768


³² Sayid Sabiq, *Fikih Sunah 13* (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), h. 36.

yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³³

Dalam menjelaskan tentang pembiayaan *mudharabah* menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSNMUI/X/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Dalam keputusannya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama tersebut menjelaskan transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.³⁴

c. Rukun Dan Syarat *Mudharabah*

1) Rukun *Mudharabah*



Guna untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat *mudharabah*. Rukun *Mudharabah* sebagai berikut:³⁵ *Shahibul maal*

³³ M. Arif Fahrudinding, *Makalah Mudharabah*, (IAIN Sultan Maulanan Hasanuddin: Banten, 2010), h. 3.

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

³⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*..., h. 243.

(pemilik modal), *Mudharib* (pengelola), *Maal* (modal), Kerja/Usaha, Nisbah (keuntungan), *Ijab Qabul*.

2) Syarat *Mudharabah*

a) Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha)

Dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau amil*).³⁶ Pelaku dalam akad *mudharabah* harus cakap hukum.

b) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Para *fuqaha* telah sepakat bahwa tidak boleh *mudharabah* dengan hutang, modal harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.

Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab Qabul*)

³⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Keuangan....*, h. 205.

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.³⁷

Para ulama *fiqih* mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu: pertama, *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; kedua, *Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*; ketiga, *Jazmul Iradataini*, yaitu antara *ijab* *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.³⁸

d) Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas

³⁷ *Ibid.* h. 206

³⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Inonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 48.

kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.³⁹

Dari penjabaran di atas maka dapat dikatakan bahwa Rukun dan Syarat *Mudharabah* adalah:⁴⁰

- a. Dua orang yang berakad (*al-aqidain*) yang terdiri dari permodal dan si pengelola. Mereka disyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah cakap hukum.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*al-maqud alaihi*) yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan keuntungan.
 - 1) *Maal* (modal) disyaratkan: uang, emas, atau perak yang distempel secara resmi.
 - 2) Diserahkan kepada pekerja secara tunai.
 - 3) Jelas jumlah, jenis, dan ukurannya.
 - 4) Merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang.
 - 5) Jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak perselisihan dikemudian hari.
- c. Pekerjaan disyaratkan
 - 1) Pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain.

³⁹ Adiwarman, A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan Edisi Keempat...., h. 207

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 210.

2) Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.

d. Keuntungan disyaratkan⁴¹

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya.
- 2) Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal.
- 3) Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati.
- 4) Keuntungan untuk dua orang yang berakad.
- 5) Pembagian keuntungan dilakukan setelah oleh pekerja mengembalikan seluruh dana.

e. Lafal akad (*shighat*)

Terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian *mudharabah*, seperti perkataan pemodal, “Ambillah harta ini secara *mudharabah*, laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya”. Lalu perkataan pekerja “Aku ambil, aku ridhai atau aku terima”.

d. Jaminan Dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Jaminan berasal dari Bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*,

⁴¹ *Ibid.*, h. 210.

yang secara umum dapat diartikan sebagai cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Segala kebendaan debitur baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.⁴²

Jaminan dalam fikih dikenal dengan *kafalah*, *dhaman*, dan dalam pengertian yang lain jaminan juga merupakan *ar-rahn* yaitu secara bahasa artinya adalah *ast-tsubūt* dan *Ad- dawām* (tetap) atau adakalanya berarti *al-habs* (menahan).⁴³ Sedangkan istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan dalam bahasa Belanda yaitu *zakerheidesstelling* atau dalam bahasa Inggris yaitu *security of law*. Pengertian hukum jaminan adalah bentuk penanggungan dimana seseorang penanggung perorangan menanggung untuk memenuhi hutang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok.⁴⁴

Dalam memberikan suatu kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas *iktikad* dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131.

⁴³ Fitria, "Sistem Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh", Skripsi Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017, h. 27.

⁴⁴ Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), h.5

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁵

Dalam sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.07/DSN MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati.⁴⁶

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini senada dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/2PBI/2005 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengelola resiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, setiap bank diwajibkan untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan wajib penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi dengan adanya peraturan yang mengatur tentang akad yang digunakan oleh bank syariah dalam hal perhimpunan dan penyaluran dana yaitu Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, dimana bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi

⁴⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006)

kewajibannya sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan. Terlebih lagi, prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syariah juga menekankan 5C, yaitu diantaranya *character*, *capacity*, *capital*, *collecteral*, dan *condition*.⁴⁷

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan pengertian tersebut jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *assesoir* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang-piutang.

Tidak semua benda atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur, yaitu:⁴⁸

- 1) *Marketability*, yaitu adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga;
- 2) *Ascertainably of Value*, yaitu jaminan harus memiliki standar harga tertentu;
- 3) *Stability of Value*, yaitu harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya;
- 4) *Transferability*, yaitu harta yang dijaminakan mudah

⁴⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*...., h. 304.

⁴⁸ Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*...., h. 19-11

dipindahtangankan baik secara fisik maupun yuridis;

- 5) *Secured*, yaitu barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.



e. **Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah***

Penyaluran *mudharabah* memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dana *mudharabah* disalurkan oleh BMT kepada anggotanya untuk usaha yang produktif.
- 2) BMT bertindak sebagai pemilik dana yang membiayai seluruh kebutuhan usaha.
- 3) Anggota BMT adalah sebagai pengelola usaha
- 4) Tata cara dan jangka waktu pengembalian modal usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁹

Dengan beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain :⁵⁰

- 1) Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- 2) *Shahibul maal* (Bank Syariah atau unit usaha syariah atau bank pembiayaan syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharabah* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- 3) *Mudarib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan

⁴⁹ Nurul Huda, *Baitul Maal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 100

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 294.

nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.

- 4) Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan atau hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.⁵¹
- 5) Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk data tunai, bukan piutang.
- 6) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha tersebut disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur yang dilakukan dengan kesengajaan.
- 7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian *mudharib*.
- 8) Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank

⁵¹ *Ibid.*, h. 295.

syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁵²

Adapun ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional antara lain:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵³

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI dimaksud yaitu SEBI No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008 menyatakan bahwa SEBI yang dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014) h. 84.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 113.

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 4) Dalam hal ini pembiayaan atas dasar sebuah akad *mudharabah muqayadah* itu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shohibul maal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud.⁵⁵
- 5) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*), dan aspek

⁵⁵ *Ibid*, h. 114.

usaha antara lain analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).

- 6) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 7) *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 8) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*
- 9) Jangka waktu pembiayaan Atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 10) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.⁵⁶
- 11) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 12) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 13) Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir

⁵⁶ *Ibid.*,

periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.

- 14) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 15) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shohibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).⁵⁷

f. Nisbah (Bagian Keuntungan)

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan, angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau *return actual* bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, *nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.⁵⁸

- 1) *Prosentase*, *nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setor

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h. 164.

modal tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

- 2) Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*Natural Uncertainty Contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya.
- 3) Jaminan. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Sedangkan *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shohibul mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shohibul mal*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Untuk menghindari *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*.
- 4) Menentukan besarnya *Nisbah*. Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka *nisbah* ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa *nisbah* 100:0 tidak diperbolehkan.
- 5) Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadinya sebuah kerugian, cara penyelesaiannya adalah:

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.⁵⁹

g. Manfaat Dan Resiko Akad *Mudharabah*

1) Manfaat *Mudharabah* adapun manfaat dari akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan akan hati-hati dalam mencari usaha yang halal, aman, dan menguntungkan. Karena pada dasarnya keuntungan yang *konkrit* dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun

⁵⁹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* Edisi 4 Cet 8, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) h. 210.

keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁶⁰

2) Risiko *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

h. Fatwa MUI tentang Mudharabah

Ketentuan mengenai pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Produk ini diharapkan bisa membangun pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bagi pengusaha muslim akan tetapi juga bagi pengusaha non-muslim asalkan pelaksanaan usaha bukan pada sektor atau bidang yang dilarang sesuai hukum islam, karena hasil yang didapat pada sektor non-halal bisa berdampak pada haramnya hasil yang didapat oleh bank dan nasabah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah pada prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun dalam praktek pada umumnya bank islam meminta beragam bentuk agunan baik dari *Mudharib* sendiri

⁶⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) h. 67.

maupun dari pihak ke tiga. Hal ini guna untuk menghindari terjadinya resiko agar mudharib tidak melakukan penyimpangan maka diperbolehkan meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Salah satu bank yang menerapkan jaminan pada pembiayaan mudharabah dalam menjalankan operasionalnya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Pringsewu.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut dapat berupa laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi.⁶¹

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Halomoan Hsb (2015) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Dengan hasil penelitian bahwa Hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa jaminan dalam praktek perbankan syariah diperbolehkan karena untuk menjaga kepercayaan dari investor, bank syariah harus menetapkan asas prudential dan kondisi masyarakat yang telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak seperti kepercayaan dan kejujuran. Oleh sebab itu larangan jaminan dalam *mudharabah* yang prinsip dasarnya bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi objektif masyarakat dalam bidang moralitas. Kemudian, Pada dasarnya dalam pembiayaan *mudharabah*

⁶¹ Odon Wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (08 September 2020 Pukul 15:56)

tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua belah pihak, maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.⁶²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Makhbuh Khumaidi (2014) yang berjudul *Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Dengan PSAK No. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syariah Cabang Yogyakarta, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Dengan hasil penelitian bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT GKBI Syariah Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK No 102 dan 105 diakibatkan oleh faktor kurangnya pengawasan pada BMT GKBI Syariah yogyakarta dan perlunya PSAK baru untuk BMT karena PSAK yang berlaku terlalu umum dan tidak sejalan dengan peraturan peroperasian sehingga BMT yang berbadan hukum koperasi butuh perhatian khusus dan dalam pelakuan akuntansinya.⁶³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Betari Tyas Maharani (2016) yang berjudul *Penerapan Akad Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Dan pengelolaan Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat. Konsentra Perbankan Syariah, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *al*

⁶²Putra Halomoan Hsb, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jaminan Pembiayaan Mudharabah* Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2015.

⁶³ Makhbuh Khumaidi, *Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Dengan PSAK No. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syariah Cabang Yogyakarta, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

qiradh 'am hasanah di BMT Global Insani, dilihat dari karakteristik, prosedur, akad tertulis, pengelolaan dan pembagian hasil dapat dikatakan sesuai dengan fatwa DSN MUI dan konsep *mudharabah* dalam fiqh. Akan tetapi, masih terdapat beberapa klausul dalam akad perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebut yang kurang sesuai dengan kaidah dan fatwa DSN. Diharapkan untuk kedepannya, BMT dapat lebih menyempurnakan kembali kejelasan penulisan akad tertulis dan kesesuaian akad pada konsep hukum syariah melihat akad tertulis merupakan suatu aspek terpenting pada suatu transaksi.⁶⁴

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tinjauan fiqh muamalah dalam kesesuaian akad pada produk pembiayaan *mudharabah* studi pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu yang berfokus pada teori pembiayaan *mudharabah* dengan penerapan atau praktik yang ada dari akad pembiayaan *mudharabah* yang mengharuskan untuk adanya sebuah jaminan dalam pembentukan akad pembiayaan *mudharabah* tersebut.

⁶⁴Betari Tyas Maharani, Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Penghimpunan Dana Dan pengelolaan Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat. Konsentra Perbankan Syariah, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Bandung: Dar Al-Qalam, tth, 2010.
- Ali, Daud Mohammad *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamal Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arsip KSPPS BMT Fajar 2018.
- AS, Susiadi *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asyhadie, Zaeni, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Asyhadie, Zaeni, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Inonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Inonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Fahrudinding, M. Arif, *Makalah Mudharabah*, (IAIN Sultan Maulanan Hasanuddin: Banten, 2010), h. 3.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:07/DSN/MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Mudharabah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN–MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

- Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanudin, Maulana Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.
- Karim, Adiwarman A, *Bank Islam: Analisis Keuangan*, Jakarta: Jajawali Pers, 2009.
- Kartono, Kartini *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131.
- Kodir Muhammad, Abdul *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Mustofa, Imam *Fiqh Muamalah Kontemporer, cet. 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

- Nadzir, Mohammad *Fiqh Muamalah Klasik*, Jarakah Tugu: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Narbuko, Cholid Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nurhasanah, Neneng *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, Rabbani Press, 1997.
- Ridwan, Muhammad *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Dyariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunah 13*, Bandung: Al-Ma'rif, 1993.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "*Fiqh al-Sunnah*", Juz 3, Bandung: Beirut: Darul-Falah al-Arabiyyah, t.th, 2010.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Yogyakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4, Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, Cet Ke-13*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugono, Dendi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat bahasa, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi XV, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan, 2015.

T. Yanggo Chuzaimah, HA. Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Usman, Husaini Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia , *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XII, No.3, Juni 2015.

Supriyadi, Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Bmt Bina Ummah Sejahtera *With Approace Of Socio Legal Research*, *Jurnal Al'adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.

Sumber on-line

Betari Tyas Maharani, Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Penghimpunan Dana Danpengelolaan Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat. Konsentra Perbankan Syariah, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Fitria, Sistem Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, Skripsi Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017

Kesesuaian (*on-line*) tersedia di <https://lektur.id/arti-kesesuaian/> (31 Januari 2020) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Makhbuh Khumaidi, Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Dengan PSAK No. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syariah Cabang Yogyakarta, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Odon1wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (08 September 2020 Pukul 15:56)

Putra Halomoan Hsb, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jaminan Pembiayaan *Mudharabah* Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2015.

Rama Dona Laila, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang”. Skripsi Program Strata I Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 2018.

Wawancara

Bapak Ahmad Nasikhin, (*Marketing Pembiayaan*), **Wawancara**, KSPPS BMT Fajar Pringsewu, 25 Agustus 2020.

Bapak Bambang Heriadi (Nasabah), **Wawancara**, KSPPS BMT Fajar Pringsewu, 29 Agustus 2020.

Bapak Belandra (*Customer Service*), **Wawancara**, KSPPS BMT Fajar Pringsewu, 25 Agustus 2020.

Bapak Endang Prayogo, (Nasabah), **Wawancara**, KSPPS BMT Fajar Pringsewu, 2 September 2020.

Bapak M. Kabul (*Marketing Funding*) **Wawancara**, KSPPS BMT Fajar Pringsewu, 26 Agustus 2020.

Bapak Muliarto (*Marketing Funding*), **Wawancara**, KSPPS BMT Fajar Pringsewu, 26 Agustus 2020.

Bapak Nikmatullah (Pimpinan Cabang), **Wawancara**, KSPPS BMT Fajar Pringsewu, 25 Agustus 2020.

Bapak Riko Ferdian (Nasabah), **Wawancara**, KSPPS BMT Fajar Pringsewu, 1 September 2020.

Bapak Turman (Nasabah), **Wawancara**, KSPPS BMT Fajar Pringsewu, 2 September 2020.

Ibu Santi (Nasabah), **Wawancara**, KSPPS BMT Fajar Pringsewu, 31 Agustus 2020.